

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN ENREKANG

Muh Akmal¹

Sitti Aisyah²

Email: muha5479@gmail.com

Jurusan Ilmu ekonomi, Universitas Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the Human Development Index, Regional Original Income and Government Expenditures on Poverty in Enrekang Regency. The type of research used in this research is quantitative research. The data processed is secondary data from the Human Development Index, Regional Original Income, Government Expenditures and Poverty in Enrekang Regency. The results showed that simultaneously the Human Development Index, Regional Original Income and Government Expenditures had significant effect on Poverty in Enrekang Regency, evidenced by the significance value smaller than the probability ($0.000 < 0.05$). Partially the Human Development Index has a negative and significant effect on poverty in Enrekang Regency, as evidenced by the significance value being smaller than the significance probability ($0.000 > 0.05$). Regional Original Income partially has a negative and significant effect on Poverty in Enrekang Regency, as evidenced by the significance value is smaller than the significance probability ($0.017 > 0.05$). And Government Expenditure partially has a negative and insignificant effect on Poverty in Enrekang Regency, as evidenced by the significance value greater than the significance probability ($0.252 > 0.05$).

Keywords: Human Development Index, Regional Original Income, Expenditure Government, Poverty.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran pemerintah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Enrekang. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang diolah adalah data sekunder dari Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah dan Kemiskinan di Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Enrekang hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas ($0.000 < 0.05$). Secara parsial Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negative dan signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Enrekang, dibuktikan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas signifikansi ($0.000 > 0,05$). Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Enrekang, dibuktikan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas signifikansi ($0.017 > 0,05$). Adapun Pengeluaran Pemerintah secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Enrekang, dibuktikan oleh nilai signifikansi lebih besar dari probabilitas signifikansi ($0.252 > 0,05$).

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan.

ARTICLE INFO

Received 14 Januari 2023

Accepted 9 Mei 2023

Online 15 Mei 2023

*Correspondence: Muh. Akmal

E-mail: muha5479@gmail.com

Pendahuluan

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi masalah yang terus-menerus terjadi di bidang ekonomi, dan telah menjadi faktor utama dalam keberhasilan banyak pemerintah dalam pembangunan nasional. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Sundari Rahma Sari 2019).

Kemiskinan memiliki dampak yang sangat besar sebab akan berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat miskin. Demikian yang dikemukakan oleh Sidabutar et al., (2020) yang menyatakan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan rendahnya produktivitas masyarakat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (Sidabutar et al., 2020).

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Enrekang dari tahun 2012-2021 secara umum sudah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2021 tingkat kemiskinan Kabupaten Enrekang meningkat menjadi 26,13% di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. hal ini disebabkan karena adanya dampak Covid-19. Mereka selama ini dibatasi untuk melakukan aktivitas keluar rumah, termasuk aktivitas dalam perdagangan yang otomatis mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat. data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Enrekang mengalami Penurunan di setiap tahunnya (Tabel 1).

Tabel 1
Data Kemiskinan Kabupaten Enrekang Tahun 2012-2021

Tahun	Kemiskinan
2012	28,73
2013	28,20
2014	27,60
2015	27,60
2016	26,98
2017	26,71
2018	25,53
2019	25,40
2020	25,25
2021	26,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2022)

Tabel 1 mempresentasikan bahwa presentase kemiskinan secara umum di Kabupaten Enrekang mengalami penurunan dari tahun 2012-2021, untuk persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Enrekang paling tinggi terjadi pada Tahun 2012 sebesar 28,73% dan jumlah penduduk miskin paling sedikit terjadi pada Tahun 2020 sebesar 25,25%. Namun dari tahun 2012-2021 mengalami penurunan hingga pada tahun 2020, dan pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Enrekang mengalami kenaikan sebesar 26,13% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang nilainya hanya sebesar 25,25%.

Tabel 2.
Data Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, dan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Enrekang 2012-2020

Tahun	IPM (%)	PAD (000 Rp)	Pengeluaran Pemerintah (000 Rp)
2012	67,38	17.229.721	605.066.331
2013	68,39	21.262.899	641.911.044
2014	69,37	32.455.808	758.072.895
2015	70,03	49.214.800	903.111.742
2016	70,79	91.793.908	1.149.853.332
2017	71,44	99.669.276	1.006.750.835
2018	72,15	66.043.332	1.021.193.268
2019	72,66	73.225.814	1.052.704.287
2020	72,76	104.657.875	1.163.683.208
2021	72,91	170.754.975	1.021.193.268

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2022)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017 IPM Kabupaten Enrekang sebesar 71,44, kemudian pada tahun 2018 meningkat sebesar 72,15 dan juga pada tahun 2019 sebesar 72,66 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 72,76 dan pada tahun 2020 juga meningkat sebesar 72,91 Hal ini terjadi karena rata-rata penduduk di Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan kekayaan yang diikuti dengan peningkatan IPM setiap tahun.

Upaya mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia dapat dilakukan dengan melakukan kebijakan belanja pemerintah, khususnya di bidang pelatihan dan kesejahteraan. Lagi pula, dalam mengurangi kemiskinan yang didorong pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan strategi pemerintah, maka IPM juga meningkat karena adanya kebijakan tersebut (Senewe et al., 2021).

Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Enrekang berdasarkan Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Dapat dipandang dalam tabel dalam Tahun 2017 PAD pada Kabupaten Enrekang sebanyak Rp 99.669.276 lalu mengalami penurunan pada Tahun 2018 sebanyak Rp66,043,332 & naik lagi dalam tahun 2019 sebanyak Rp73,225,814 lalu terjadi lagi kenaikan dalam Tahun 2020 sebanyak Rp104,657,875. Kemudian pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp170.754.975.

Terdapat hubungan antara kemiskinan dengan PAD, Pendapatan asli yang diterima pemerintah daerah menggambarkan tingkat kesiapan dalam mengelola daerahnya. Pendapatan daerah yang lebih tinggi berarti semakin besar anggaran belanja Yang tersedia terutama dalam pengalokasian untuk kesejahteraan masyarakat.hal ini menjadi salah salah indikator kemiskinan, jika suatu daerah memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi maka semakin rendah tingkat kemiskinan daerah tersebut (Kawulur et al., 2019). PAD bertujuan untuk pemberdayaan pemerintah lingkungan untuk membiayai pelaksanaan kemerdekaan provinsi mengingat potensi teritorial sebagai jenis desentralisasi (Nurhabibaha et al., 2022).

Pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi (Pratama & Utama, 2019).

Upaya yang dilakukan pemerintahan guna kesejahteraan masyarakat disebut sebagai pengeluaran pemerintah dengan nilai belanjanya (Sidabutar et al., 2020). Guna kepentingan masyarakat, pemerintah menggunakan pengeluaran. Kebijakan pemerintah diartikan sebagai pengeluaran pemerintah. Investasi konkrit untuk meningkatkan produktivitas masyarakat adalah salah satu bentuk belanja publik (Sidabutar et al., 2020). Belanja publik di Kabupaten Enrekang tahun 2017-2021 selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2017 pengeluaran pemerintah sebesar Rp1.006.750.835 kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp1.021.193.268 kemudian pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan Rp1.052.704.287 dan pada tahun 2020 peningkatan yang cukup besar sebesar Rp1.163.683.208 dan pada tahun 2021 mengalami Penurunan sebesar Rp1.021.193.268.

Besarnya pengeluaran pemerintah, serta naiknya PAD di Kabupaten Enrekang ternyata tidak lantas menyebabkan angka kemiskinan menurun seperti yang terlihat pada Tabel 1. Demikian pula pada kenaikan IPM yang tidak terlalu signifikan. Olehnya, penelitian ini berusaha menganalisa fenomena yang terjadi di Kabupaten Enrekang.

Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dalam angka-angka dengan perhitungannya menggunakan metode statistik yang dilakukan melalui *software Eviews 10*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, dan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Enrekang 2012-2020. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Enrekang.

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, yaitu pemeriksaan ketergantungan satu variabel (variabel terikat) pada dua variabel (bebas) lainnya (Fadila et al., 2020). Pengujian tersebut dinyatakan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \mu$$

Di mana: X_1 adalah Indeks Pembangunan Manusia; X_2 adalah Pendapatan Asli Daerah; X_3 adalah pengeluaran pemerintah; Y_1 adalah kemiskinan; α adalah konstanta; β_1 , β_2 , β_3 adalah koefisien regresi, dan μ adalah *Error Term*.

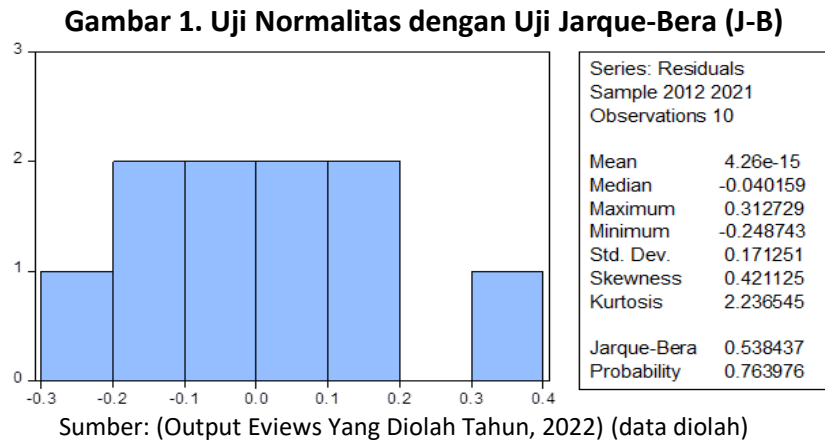
Hasil Dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan dan digunakan dalam analisis regresi dapat menghasilkan analisis yang valid. Uji asumsi klasik yang biasa digunakan ada empat macam, antara lain:

1. Uji Normalitas

Gambar 1 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,763976 atau lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.



2. Uji Heterokedastisitas

Tabel 3 Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.220541	Prob. F(3,6)	0.8788
Obs*R-squared	0.993185	Prob. Chi-Square(3)	0.8029
Scaled explained SS	0.221061	Prob. Chi-Square(3)	0.9741

Sumber:(Output Eviews Yang Diolah Tahun, 2022) (data diolah)

Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser yang dilakukan oleh Peneliti maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan nilai probabilitas dalam penelitian ini lebih besar dari 0.05. maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

1. Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Hasil estimasi yang didapatkan dengan aplikasi Eviews 10, memberikan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.970516 yang mengindikasikan secara keseluruhan variabel bebas Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah dan pengeluaran pemerintah yang ada pada persamaan bisa menjelaskan hubungan terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi sebesar 97% dan sisanya (100-97) = 3% yang mempengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian.

Tabel 5 Hasil Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.980344
Adjusted R-squared	0.970516

Sumber: (Output Eviews Yang Diolah Tahun, 2022) (data diolah)

2. Pengujian Signifikansi Simultan (Uji-F)

Tabel 6 Hasil Uji Simultan (Uji-F)

F-statistic	99.74991
Prob(F-statistic)	0.000016

Sumber: (Output Eviews Yang Diolah Tahun, 2022) (data diolah)

Hasil estimasi yang diolah dari nilai F-statistik sebesar 99.74991 bernilai probabilitas F-statistik $0.000016 < 0.05$, maka hipotesis diterima yang memperlihatkan secara bersamaan variabel bebas yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah dan pengeluaran sektor publik yang digunakan dalam model persamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan pada tingkat kepercayaan 97%.

3. Pengujian Parsial (Uji-t)

Tabel 7 Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	100.7588	19.80568	5.087370	0.0022
X1	-0.879706	0.100687	-8.737008	0.0001
X2	-1.413889	0.434969	-3.250549	0.0175
X3	-1.789802	1.413558	-1.266168	0.2524

Sumber: (Output Eviews Yang Diolah Tahun, 2022) (data diolah)

Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pengolahan data yang dilakukan memberikan nilai t-statistik negatif sebesar -8,737008 dengan nilai probabilitas 0,0001, hal ini dapat diartikan bahwa nilai probabilitas variabel indeks pembangunan manusia t-statistik lebih kecil dari α ($0,0001 < 0,05$) dengan ini hipotesis diterima. Jadi variabel indeks pembangunan manusia secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengolahan data yang dilakukan menghasilkan nilai t-statistik yang bernilai negatif -3.250549 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0175 maka dapat diartikan bahwa nilai probabilitas t-statistik variabel Indeks Pembangunan Manusia lebih kecil dari α ($0.0175 < 0.05$) dengan ini hipotesis diterima. Dengan demikian, variabel pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Pengeluaran Pemerintah

Hasil olah data yang dilakukan menghasilkan nilai t-statistik yang bernilai negatif -1.266168 dengan nilai probabilitas sebesar 0.2524 maka dapat diartikan bahwa nilai

probabilitas t-statistik variabel pengeluaran pemerintah lebih besar dari α ($0.2524 > 0.05$). Hal ini diartikan bahwa pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi kemiskinan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan memiliki nilai signifikansi $0,0001 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi $-0,879706$ yang berarti indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di wilayah Enrekang dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia akan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Enrekang begitu pun sebaliknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia, merupakan salah satu faktor pengentasan/menurunkan kemiskinan yang ada di Kabupaten Enrekang, yang artinya jika IPM (tingkat kesehatan, Pendidikan dan daya beli) meningkat akan mengakibatkan tingkat produktivitas masyarakat menjadi tinggi karena dipengaruhi oleh sumber daya alam yang berkualitas, sehingga IPM merupakan elemen penting dalam menurunkan angka Kemiskinan di Kabupaten Enrekang.

Kiha et al (2021) mencatat bahwa IPM memiliki implikasi untuk pengurangan kemiskinan. Perhitungan IPM menggunakan indikator komposit termasuk harapan hidup, tingkat melek huruf dan konsumsi per kapita. di bidang kesehatan dan pendidikan, seperti halnya peningkatan pendapatan per kapita yang mendorong pembangunan manusia, sehingga peningkatan kualitas penduduk di wilayah tersebut akan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Fadila et al., 2020) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tingginya nilai Indeks Pembangunan Manusia cenderung diikuti dengan penurunan jumlah tingkat kemiskinan. Selain itu penelitian ini juga searah dengan penelitian yang dilakukan Rian Hidayat (2017) dan Zuhdiyaty & Kaluge (2018) yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Palaneven, (2018) yang mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Masyarakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terhadap kemiskinan memiliki nilai signifikan $0.0175 < 0.05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar -1.413889 yang berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Enrekang pada tahun 2012 hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh akan menurunkan angka kemiskinan di kabupaten enrekang begitu pun sebaliknya. Hal ini juga nampak pada masing-masing data Tabel 4.2 dan Tabel yang memperlihatkan bahwa PAD di Kabupaten Enrekang mengalami kenaikan selama sepuluh tahun terakhir demikian pula dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Enrekang mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan awal daerah berperan penting dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Enrekang. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar anggaran belanja terutama dalam pengalokasian belanja untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator kemiskinan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah maka semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat.

(Paramita, 2021) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri yang bertujuan membiayai daerah dengan peningkatan kualitas pelayanan publik atau dengan kata lain memenuhi kebutuhan masyarakat pada daerah tersebut. Semakin tinggi PAD yang diperoleh dari berbagai sumber, maka otonomi daerah semakin memanfaatkan aset yang ada melalui alokasi belanja modal. Dalam suatu daerah, Semakin besar pendapatan PAD maka berdampak besar terhadap pembangunan dalam sektor kualitas pelayanan publik yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan di suatu daerah tersebut akan menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi et al., (2016) mengatakan bahwa pendapatan awal daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Bitung.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah terhadap kemiskinan memiliki nilai signifikan $0.2524 > 0.05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar -1.789802 yang berarti pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Enrekang pada tahun 2012 hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rendahnya pengeluaran pemerintah di Kabupaten Enrekang tidak memberikan efek terhadap kemiskinan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian.

Pengeluaran pemerintah tidak signifikan karena pengeluaran pemerintah Kabupaten Enrekang hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur yang tidak bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat dan juga pengeluaran pemerintah berupa bantuan langsung tunai (BLT) hanya digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belanja/konsumsi bukan untuk dijadikan modal usaha sehingga tidak mampu mendongkrak perekonomiannya. Pemerintah kabupaten dalam upaya pengentasan kemiskinan perlu menentukan pelaksanaan kebijakan untuk mengidentifikasi kebijakan mana yang dibutuhkan oleh suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan yang lebih mempengaruhi penurunan kemiskinan melalui pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, perumahan, teknologi dan sebagainya. Serta program pemberdayaan masyarakat harus ditunjukkan kepada masyarakat miskin agar lebih produktif sehingga memiliki penghasilan yang lebih baik. Dengan semakin besar dan tepatnya pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Enrekang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja pemerintah terbukti memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan. Artinya semakin tinggi pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Di sisi lain, kemiskinan adalah kemampuan orang miskin untuk menerima layanan berdasarkan standar hidup mereka. Seperti halnya dapat memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan, maka disinilah peran pemerintah melalui pengeluarannya dapat memberikan dana berupa pelayanan publik yang memudahkan masyarakat miskin.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Isman (2020) menyatakan bahwa Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan lebih meningkatkan anggaran belanja/belanjanya, khususnya pengeluaran/belanja untuk pengentasan pengentasan kemiskinan, dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara lebih merata.

Hal ini tidak sesuai dengan penelitian (Khamilah, 2015) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Enrekang yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten Enrekang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika Indeks Pembangunan Manusia naik maka akan memberikan pengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Enrekang. Di samping itu, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten Enrekang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka akan memberikan pengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Enrekang. Sementara Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan kabupaten Enrekang. Setelah melakukan serangkaian pengujian dan pembahasan Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan belanja publik dalam kaitannya dengan program pengentasan kemiskinan, sehingga program yang dilaksanakan tepat sasaran, dan tepat waktu serta memberikan manfaat bagi penurunan jumlah penduduk miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N., Yusuf, Y., & Iyan, R. (2016). Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 870–882.
- Fadila, R., Pendidikan Ekonomi, J., Ekonomi, F., & Negeri Padang, U. (2020). *Maret 2020* Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. 3(1).
- Isman, fiqi muhamad. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingginya Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015-2019 (Studi Kasus Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi). 2019.
- Kawulur, S., Kolenangan, A. ., & C. Wauran, P. (2019). Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03), 107–117.
- Khamilah, H. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *Paper Knowledge*

- . *Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Lau, H. T. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Belu. 2(07), 60–84.
- Nurhabibaha, A., Boedirochminarnib, A., & Sar, N. P. (2022). Pengaruh PAD dan Angkatan Kerja Terhadap IPM Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019. 6(1), 26–40.
- Output Eviews Yang Diolah Tahun. (2022). *Hasil Eviews*.
- Palaneven, T. O. M. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 52–61.
- Paramita, O. R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018. 6.
- Pratama, N. R. N. S., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8 [7](2337–3067), 651–680.
- Rian Hidayat. (2017). *Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*. 4(95), 1–28. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33026/1/NITA_FITRIANI-FKIK.pdf
- Senewe, J., Rotinsulu, D. C., & Lapian, A. L. C. P. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 9(3), 173–183.
- Sidabutar, S., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun: 2(2).
- Sundari, S. R. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1990-2018. 2, 89.
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2018). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27–31. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.42>